



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Title

Peran Pemdes pada Pemberdayaan perempuan di Desa Jambangan_lis Harianti RPL

Author(s)

Coordinator

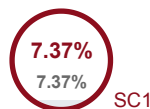
Administrasi PublikIlmi Usrotin C

Organizational unit

FBHIS

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

**6964**

Length in words

54734

Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet	ß	0
Spreads	A→	0
Micro spaces	␣	0
Hidden characters	␣	0
Paraphrases (SmartMarks)	a	21

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf	72 1.03 %
2	https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/334/9/UNIKOM_RIVANDY%20MANURUNG_BAB%20III.pdf	63 0.90 %
3	https://etheses.iainkediri.ac.id/1688/3/931344415_bab%202.pdf	57 0.82 %
4	UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA KELOMPOK WANITA TANI MATAHARI Isabella Isabella, Amanda Vannia Tri, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain;	44 0.63 %

5	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/6296/45095/50463	31 0.45 %
6	https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/21237/20946	19 0.27 %
7	https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/334/9/UNIKOM_RIVANDY%20MANURUNG_BAB%20III.pdf	18 0.26 %
8	https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/334/9/UNIKOM_RIVANDY%20MANURUNG_BAB%20III.pdf	13 0.19 %
9	https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-tangerang/pendidikan-agama-islam/bayi-baru-lahir-2-addddddddddddddddddddddd/52324560	13 0.19 %
10	UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA KELOMPOK WANITA TANI MATAHARI Isabella Isabella,Amanda Vannia Tri, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain;	12 0.17 %

from RefBooks database (1.12 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
Source: Paperity		
1	UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA KELOMPOK WANITA TANI MATAHARI Isabella Isabella,Amanda Vannia Tri, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain;	73 (4) 1.05 %
2	STRATEGI PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG BERINGIN I, KECAMATAN SUMBUL, KABUPATEN DAIRI) Jhonson Pasaribu, Maringan Panjaitan, Tobing Artha L.,Juli Tiarma Br. Sihalohe;	5 (1) 0.07 %

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Database Exchange Program (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Internet (6.25 %)

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/334/9/UNIKOM_RIVANDY%20MANURUNG_BAB%20III.pdf	94 (3) 1.35 %
2	http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf	88 (3) 1.26 %
3	https://etheses.iainkediri.ac.id/1688/3/931344415_bab%202.pdf	57 (1) 0.82 %
4	https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/21237/20946	33 (3) 0.47 %
5	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/6296/45095/50463	31 (1) 0.45 %
6	https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-tangerang/pendidikan-agama-islam/bayi-baru-lahir-2-addddddddddddddddddddddd/52324560	24 (2) 0.34 %
7	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/6121/43625/48788	23 (3) 0.33 %
8	https://etheses.iainkediri.ac.id/12233/4/933703616_bab3.pdf	15 (2) 0.22 %
9	http://repository.uin-alauddin.ac.id/25492/1/Novi%20Puspita%20Sari%20Friana_80500219032.pdf	12 (1) 0.17 %
10	http://digilib.isi.ac.id/16371/2/ADITYA%20RACHMAN_2024_BAB%20I.pdf	12 (1) 0.17 %

11	https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitik/article/view/5242	11 (1) 0.16 %
12	https://www.panda.id/kewenangan-bpd/	10 (1) 0.14 %
13	http://repository.unwira.ac.id/12953/1/ABSTRAK.pdf	10 (1) 0.14 %
14	http://repository.uin-suska.ac.id/12896/7/7.%20BAB%20II_201860ADN.pdf	10 (1) 0.14 %
15	https://repository.unsimar.ac.id/1147/4/BAB%20I.pdf	5 (1) 0.07 %

List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	----------	---------------------------------------

The Role of Village Government in Women's Empowerment in Jambangan Village, Candi Subdistrict, Sidoarjo Regency
[Peran Pemerintah Desa Pada Pemberdayaan Perempuan di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo].

lis Harianti 1), Ilmi Usrotin Choiriyah 2) 1)Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 2)Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia *Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Page | 1

8 | Page

Page | 7

Abstract. Women's empowerment is an important aspect in inclusive and sustainable village development. This study aims to analyze the role of the Jambangan Village Government in supporting women's empowerment through four role indicators according to Talcott Parsons, namely: as a motivator, facilitator, mobilizer, and regulator. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the Jambangan Village Government has implemented various strategy programs, such as skills training, the formation of women's cooperatives, strengthening health cadres, and activating the role of the PKK. The village government not only motivates and facilitates women's activities, but also encourages active participation and the preparation of regulations in development planning. However, there are still challenges such as limitations on women's participation, time and budget constraints, and the absence of special legal regulations (Perdes) that guarantee the desire for empowerment programs. This study recommends the importance of strengthening legal institutions and community-based inclusive mobilization strategies to create empowerment that is more equitable, sustainable, and responsive to the local needs of village women.

Keywords - Women's Empowerment, Village Government, Village Program's, Womens Participation.

Abstrak. Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Jambangan dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui empat indikator peran menurut Talcott Parsons, yaitu: sebagai motivator, fasilitator, mobilisator, dan regulator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jambangan telah menjalankan berbagai program strategis, seperti pelatihan keterampilan, pembentukan koperasi wanita, penguatan kader kesehatan, serta aktivasi peran PKK. Pemerintah desa tidak hanya memotivasi dan memfasilitasi kegiatan perempuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan perumusan regulasi dalam perencanaan pembangunan. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan partisipasi perempuan, keterbatasan waktu dan dana, serta belum adanya regulasi hukum khusus (Perdes) yang menjamin keberlanjutan program pemberdayaan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kelembagaan hukum dan strategi mobilisasi inklusif berbasis komunitas untuk menciptakan pemberdayaan yang lebih merata, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal perempuan desa.

Kata Kunci - Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Desa, Program Desa, Partisipasi Perempuan

1. I. Pendahuluan

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Di Indonesia, perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam keluarga, sosial, dan ekonomi. Namun demikian, perempuan di pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, keterbatasan ekonomi, hingga minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.[1]

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan. Melalui berbagai program dan kebijakan berbasis masyarakat, pemerintah desa dapat menjadi katalisator perubahan sosial yang lebih inklusif dan setara gender. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga desa dan pemanfaatan Dana Desa menjadi peluang besar untuk mewujudkan program-program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan riil perempuan di desa.[2]

Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa yang aktif dalam mengembangkan potensi sumber daya manusianya, termasuk pemberdayaan perempuan "Pemberdayaan perempuan adalah segala upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan agar setara dalam pembangunan." Menurut Tutik Sulistyowati di dalam jurnalnya yang dikutip dari Kemen Pemberdayaan Perempuan (Kemen PP) bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya memungkinkan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.[10]

Berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, dan pembentukan organisasi yang beranggotakan Perempuan menjadi bagian dari upaya desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kaum perempuan. Namun, efektivitas peran pemerintah desa dalam proses ini masih perlu diteliti lebih

lanjut, mengingat masih adanya ketimpangan dan hambatan yang dihadapi perempuan di tingkat akar rumput.[3] Berikut data program perempuan di Desa Jambangan :

Tabel 1. Program Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan	Jumlah Peserta	Frekuensi	Dampak dan Keberlanjutan
----------	----------------	-----------	--------------------------

Pelatihan keterampilan	75 peserta	(34 Ibu RT, 8 Ibu RW, 23 Pengurus PKK, dan 10 perwakilan anggota kader Kesehatan)	2 kali/tahun
------------------------	------------	---	--------------

Peserta pelatihan memperoleh ilmu dan keterampilan yang berbeda setiap tahun, namun tidak ada tindak lanjut untuk memantau kegiatan perempuan di desa setelah pelatihan.

Organisasi PKK aktif 23 anggota (Pengurus PKK) Rutin bulanan Menjalankan 5 program pokok PKK Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dan inovasi dalam peningkatan kapasitas perempuan di desa. Hasilnya ialah PKK aktif dengan 23 anggota, rutin berkegiatan setiap bulan, dan menjalankan lima program pokok di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketahanan keluarga.

Koperasi Wanita Kemuning 40 anggota (Pengurus Harian Koperasi) Aktif Omzet koperasi meningkat 20% dalam 1 tahun ini menunjukkan target yang sudah dilampaui karena pada awalnya target per tahun naik sebesar 10% dan keberlanjutan program ini ialah tetap aktif untuk membantu ekonomi perempuan dengan program kopersinya.

Kader kesehatan 38 anggota (Pelaksana Harian Kegiatan Kesehatan) Rutin bulanan Partisipasi aktif anggota kader kesehatan terhadap program kesehatan untuk masyarakat jadi Keberlanjutan pada masyarakat terlihat dari keterlibatan kader kesehatan yang terus aktif memberikan layanan posyandu, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara terus-menerus di desa.

(Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Jambangan 2024)

Tabel di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Jambangan telah menjalankan berbagai program konkret dalam rangka pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat beberapa program utama yang dijalankan, pertama Pelatihan Keterampilan Perempuan, Program ini diikuti oleh sekitar 75 peserta perempuan setiap tahunnya yang terdiri dari Ibu-Ibu RT dan RW se-Desa Jambangan, beberapa Ibu PKK dan melibatkan Ibu Kader Kesehatan kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun. Materi pelatihan telah disesuaikan secara berkala sehingga peserta memperoleh ilmu dan keterampilan yang berbeda tiap tahun, seperti pelatihan membuat kue kering, keterampilan kerajinan, pelatihan membuat dimsum, pudding art dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dan inovasi dalam peningkatan kapasitas perempuan di desa. Kedua Pemerintah desa mendorong penguatan organisasi perempuan melalui PKK yang beranggotakan 23 orang dan rutin melaksanakan kegiatan setiap bulan. Hasil dari pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa PKK berhasil menjadi wadah strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan desa. Pelibatan perempuan dalam kegiatan PKK berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran kesehatan keluarga, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif, serta tumbuhnya kepedulian terhadap kebersihan dan ketahanan lingkungan. Selain itu, program-program PKK juga berkontribusi dalam memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas. Secara umum, keberadaan organisasi PKK aktif telah memberikan ruang aktualisasi bagi perempuan desa untuk berkembang, berkontribusi, dan membentuk jaringan sosial yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, Koperasi Wanita, Pembentukan koperasi wanita menjadi langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.[3] Koperasi ini memiliki 40 anggota aktif dengan target 10% dalam setahun tapi dalam satu tahun terakhir, mampu mencatatkan peningkatan omzet sebesar 20% yang mengindikasikan bahwa target telah terlampaui. Capaian ini mengindikasikan bahwa perempuan di desa mulai mampu mengelola kegiatan ekonomi secara kolektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Hasilnya, sebagian besar anggota koperasi mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga, lebih mandiri secara finansial, dan mulai berkontribusi dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat keluarga maupun komunitas.[4] Keempat Pengkaderan Kader Kesehatan, yaitu program pelatihan dan pendampingan kepada perempuan untuk menjadi kader posyandu dan kesehatan lingkungan. Para kader ini berperan penting dalam Posyandu rutin Balita, Lansia dan remaja, penyuluhan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, serta upaya promotif dan preventif terhadap kesehatan masyarakat desa. Pengkaderan ini menjadi bukti bahwa perempuan dilibatkan dalam sektor kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan dasar di tingkat desa. Data tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Desa Jambangan telah melaksanakan pendekatan pemberdayaan yang komprehensif, meliputi aspek ekonomi, sosial, organisasi, dan kesehatan. Meski demikian, efektivitas dari program-program tersebut perlu terus dikaji, termasuk tantangan partisipasi aktif, keberlanjutan program, dan dukungan lintas sektor.[5]

Permasalahan yang muncul terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Jambangan ialah ketimpangan antara peran formal dan implementasi nyata di lapangan, masih ditemukan kesenjangan antara fungsi yang seharusnya dijalankan dan kenyataan di lapangan. Pelatihan rutin belum diikuti oleh seluruh perempuan desa karena keterbatasan waktu, sosial, dan dana. Kurangnya partisipasi aktif perempuan meskipun program telah berjalan, tidak semua perempuan tertarik atau mampu berpartisipasi dalam program yang disediakan oleh desa. dari segi aspek kebijakan yang menjamin keberlanjutan pemberdayaan, pemerintah desa mungkin sudah menetapkan program pemberdayaan, tetapi belum ada regulasi desa yang mengikat secara hukum atau tidak adanya monitoring keberlanjutan program. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya perangkat desa mungkin belum memiliki keterampilan memadai dalam memberikan pendampingan sehingga peran mereka sebagai fasilitator dan motivator tidak maksimal.[3]

Penelitian ini adalah merupakan pengembangan dari kajian-kajian penelitian terdahulu dengan fokus kajian yang relatif serupa yakni mengkaji peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Perempuan dan atau subjek Pemberdayaan yang lain. Hasil penelitian terdahulu oleh ISRA HAYATI (2021) menyatakan bahwa peran pemerintah Desa Lamamek dalam pemberdayaan perempuan sudah optimal berdasarkan indikator kebijakan, strategi, dan komunikasi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, minat, dan partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan.[6] Hasil kajian empiris lainnya yakni penelitian terdahulu oleh Miftahuljannah, Isabella, Amaliatulwalidain (2022) menyatakan bahwa penilaian terhadap kepala desa menunjukkan bahwa ia telah menjalankan program pemberdayaan perempuan dengan baik melalui kegiatan PKK. Pelatihan yang telah dilaksanakan mencerminkan keseriusan kepala desa dalam memberdayakan perempuan guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Air Balui.[1] Hasil kajian empiris lainnya yaitu oleh Vannia Tri Amanda, Amaliatul walidain, Isabella (2023) **Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan pada program kelompok wanita tani (KWT) matahari pada tahun 2022 di desa rantau kasih dinyatakan cukup berhasil. Tahapan-tahapan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan masing-masing memiliki peran penting dalam mencapai tujuan KWT Matahari.**[7] Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut, tentang **peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan** di Desa Jambangan serta mengevaluasi dampak dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut. **Hasil penelitian ini diharapkan dapat** menjadi referensi dalam pengembangan strategi pemberdayaan perempuan yang lebih terarah dan berkelanjutan di tingkat desa.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (**status**), **apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.**[8] Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa " Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara**

pemerintahan desa. Sutoro Eko (2012) "Pemerintah desa bukan hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan warga desa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA):[9]

Jadi dapat disimpulkan Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan merupakan pelaksanaan fungsi dinamis sesuai kedudukannya untuk mendorong perempuan agar memiliki akses, kontrol, dan kepercayaan diri dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Peran Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan Perempuan dapat dideskripsikan dengan indikator peran menurut Talcott Parsons (dalam Sutoro Eko, 2012), indikator peran tersebut ialah motivator, fasilitator, mobilisator, dan regulator (Parsons, dalam Sutoro Eko, 2012)." Konsep ini dijelaskan oleh Sutoro Eko dalam bukunya *Desa Membangun Indonesia*, yang mengadopsi pemikiran Talcott Parsons mengenai fungsi-fungsi sistem sosial. Berikut penjabaran keempat peran tersebut yaitu Peran Motivator, kemampuan pemerintah desa untuk membangkitkan kesadaran dan semangat warga desa agar mau terlibat aktif dalam pembangunan. Ini mencakup upaya membangun etos kerja, kesadaran kritis, dan rasa percaya diri masyarakat.[9] Pemerintah desa berperan dalam memberikan dorongan dan semangat kepada perempuan untuk aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye yang mendorong partisipasi Perempuan. Peran Fasilitator, Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk menyediakan tempat pelatihan, akses ke informasi, dan bantuan teknis lainnya. Peran Mobilisator, Pemerintah desa menggerakkan dan mengorganisir perempuan untuk terlibat dalam program-program pembangunan. Ini melibatkan pembentukan kelompok-kelompok perempuan, seperti PKK atau koperasi wanita, yang dapat menjadi wadah partisipasi aktif. Peran Regulator, Pemerintah desa menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Ini termasuk pembuatan peraturan desa yang menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan.[11] Berdasarkan pada latar masalah penelitian yang dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa pada Pemberdayaan Perempuan di Desa Jambangan.

2. II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.** Menurut Indriantoro dan Supono (2012:26) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. [12] Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. [13] Penelitian ini berlokasi di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang dikenal aktif dalam program pemberdayaan perempuan.

Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Jambangan. **Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah : "Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti."** (Sugiyono, 2016). [14] **Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait** Pemerintah Desa. **Kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:** a) Kepala Desa Jambangan memiliki wewenang dan terlibat langsung dalam pelaksanaan serta pengawasan seluruh kegiatan Pemberdayaan Perempuan, b) Perwakilan Perempuan Desa Jambangan, c) Sekretaris Desa Jambangan memiliki peran untuk membantu membuat kebijakan dan peraturan. Ada dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu Data Primer **menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian, dan Data** sekunder yaitu laporan kegiatan, catatan-catatan dan dokumen lain. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015) terdiri atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. [15] Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data merupakan proses mengorganisasi, mengolah, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan makna terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis data mengacu pada konsep Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu proses menghimpun data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah penyajian data, yakni mengorganisasikan informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menafsirkan data secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah serta menghasilkan temuan penelitian yang valid dan bermakna. [16]

3. III. Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan program pemberdayaan perempuan di tingkat desa sangat bergantung pada partisipasi aktif perempuan itu sendiri, serta dukungan pemerintah desa sebagai penggerak pembangunan sosial. Perempuan tidak lagi ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif **yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.** Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif, termasuk kelompok perempuan sebagai bagian integral dari sistem sosial masyarakat.

Pemberdayaan perempuan di desa tidak cukup hanya melalui kebijakan bersifat formal, tetapi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup pendampingan, pelatihan, dan penyediaan ruang partisipasi yang adil. Peran pemerintah desa menjadi kunci dalam menciptakan kondisi tersebut, karena pemerintah desa memiliki kedekatan struktural dan kultural dengan masyarakat. Ketika pemerintah desa mampu memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, mobilisator, dan regulator secara optimal, maka potensi perempuan desa dapat berkembang dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan lokal.

Namun demikian, keberhasilan pemberdayaan juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran, kapasitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat perempuan itu sendiri. Dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan berupa keterbatasan partisipasi aktif sebagian perempuan, terutama dalam kegiatan yang bersifat strategis atau berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam mendorong pemberdayaan ini dijalankan secara nyata, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas peran tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa Pemerintah Desa telah menjalankan peran penting dalam pemberdayaan perempuan dengan merujuk pada teori Talcott Parsons yang mencakup empat indikator: motivator, fasilitator, mobilisator, dan regulator. Keempat peran tersebut menjadi pondasi utama dalam menggerakkan partisipasi perempuan secara lebih aktif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa. Adapun implementasi dari masing-masing peran tersebut akan dijabarkan secara rinci dalam bagian hasil dan pembahasan berikut.

1. Motivator

Peran sebagai motivator merupakan tanggung jawab penting yang diemban oleh pemerintah dalam mendorong perempuan agar memiliki semangat, kesadaran, dan kepercayaan diri untuk berdaya serta aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan, motivasi menjadi

kunci awal yang sangat menentukan, sebab perubahan sosial sering kali dimulai dari kesadaran individu terhadap potensi dan peran yang dimilikinya. Ketika perempuan merasa didukung dan diberi ruang untuk berkembang, mereka cenderung lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan produktif.

Pemerintah desa, memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjalankan peran ini secara lebih efektif. Melalui program-program pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Pemerintah desa dapat menumbuhkan semangat baru di kalangan perempuan, terutama dalam hal kemandirian ekonomi. Bentuk motivasi ini tidak hanya bersifat verbal atau moral, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan.

Motivasi yang diberikan pun harus sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal agar lebih bermakna dan berdampak jangka panjang. Ketika perempuan merasa bahwa keterampilan yang mereka pelajari relevan dengan kehidupan sehari-hari, maka dorongan untuk terus berkembang akan muncul secara alami. Dalam jangka panjang, motivasi yang kuat dapat membentuk pola pikir dan kebiasaan baru, di mana perempuan menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan berani mengambil peran lebih besar dalam keluarga maupun masyarakat.

Pemerintah Desa Jambangan berperan sebagai motivator dalam meningkatkan semangat dan kesadaran perempuan untuk berdaya secara ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Jambangan melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun. Di Desa Jambangan, motivasi ditumbuhkan melalui pelatihan keterampilan seperti pembuatan makanan ringan, kerajinan tangan, hingga bisnis digital. Keberagaman materi pelatihan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga visioner dan kontekstual dengan perkembangan zaman.

Selain memberikan pelatihan, pemerintah desa juga berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya semangat kemandirian di kalangan perempuan. Pelatihan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri dan kesadaran bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi keluarga. Program ini tidak sekadar bersifat instruksional, melainkan juga dialogis dan partisipatif, sehingga para peserta merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang.

Adanya variasi materi pelatihan setiap tahun turut menjaga antusiasme peserta dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pelatihan menjadi wadah bagi perempuan untuk saling berbagi pengalaman, membentuk jaringan sosial, dan memperkuat solidaritas sesama anggota masyarakat. Dalam jangka panjang, kegiatan ini membentuk kebiasaan baru yang positif, di mana perempuan lebih aktif mengambil peran dalam kegiatan ekonomi maupun sosial di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran motivator yang dijalankan pemerintah desa telah berdampak nyata dalam proses pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa peran motivator yang dijalankan oleh pemerintah desa Jambangan telah berdampak nyata dalam proses pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Komitmen tersebut juga tercermin dalam pernyataan Ibu Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan berikut ini:

"Kami ingin ibu-ibu di desa punya bekal keterampilan yang bisa menambah penghasilan. Ini bagian dari upaya kami agar perempuan tidak hanya bergantung pada suami."

4.

5.

6. Sumber : Pemerintah Desa Jambangan (2024)

7. Gambar 1. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Desa Jambangan Tahun 2024

8.

Salah satu contoh motivasi yang diberikan Pemerintah Desa Jambangan agar Perempuan di Desa Jambangan antusias mengikuti Pelatihan Perempuan adalah dengan memberikan fasilitas alat dan bahan yang bisa dibawa pulang ketika selesai pelatihan. Jenis pelatihan yang terdapat di Desa Jambangan meliputi pembuatan makanan ringan (dimsum, kue kering, puding art), keterampilan tangan, hingga pelatihan bisnis digital skala mikro. Ini menunjukkan bahwa program pelatihan tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga mulai merambah ke bidang yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pandangan dan pengalaman peserta pun menunjukkan bahwa pelatihan ini memberikan dampak nyata dan terus berkembang setiap tahunnya. Khusnul Khotimah selaku anggota PKK menyampaikan:

"Pelatihannya selalu beda-beda tiap tahun, jadi ibu-ibu senang karena bisa punya keahlian baru tiap ikut pelatihan."

9.

10. Sumber : Diolah TP PKK (2024)

11. Gambar 2. Wawancara Khusnul Khotimah (anggota PKK)

12.

Kurang lebih sebanyak 75 perempuan mengikuti program ini setiap tahunnya. Jumlah tersebut mencerminkan antusiasme dan partisipasi aktif perempuan dalam memanfaatkan peluang pemberdayaan yang tersedia di tingkat desa. Program ini secara nyata meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi peserta, karena mereka tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mengalami peningkatan dalam hal keberanian untuk memulai usaha dan terlibat dalam kegiatan komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Jambangan dan temuan dalam skripsi Isra Hayati di Desa Lamamek, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan yang mencolok dalam hal peran pemerintah desa sebagai motivator dalam pemberdayaan perempuan. Kedua desa sama-sama menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Program pelatihan yang diberikan, baik di Jambangan maupun Lamamek, bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan keterampilan perempuan agar lebih mandiri dan berdaya. Baik Pemerintah Desa Jambangan maupun Lamamek menyediakan pelatihan keterampilan, seperti kerajinan tangan dan usaha mikro, sebagai sarana membangkitkan kepercayaan diri perempuan agar aktif berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Persamaan lainnya terlihat dari pentingnya konteks lokal dalam merancang pelatihan. Desa Jambangan memberikan pelatihan seperti pembuatan makanan ringan dan bisnis digital yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lokal, sedangkan Desa Lamamek menawarkan pelatihan berbasis tradisional seperti anyaman yang juga mencerminkan karakter budaya setempat. Pandangan ini sejalan dengan temuan Isra Hayati (2021) yang menyatakan bahwa motivasi dan partisipasi perempuan akan meningkat apabila pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan lokal dan kehidupan mereka sehari-hari.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan dampak dari program tersebut. Pemerintah Desa Jambangan menerapkan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam kegiatan pelatihan, di mana peserta merasa dihargai dan didorong untuk terus belajar, yang berdampak pada peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi perempuan. Sementara itu, di Desa Lamamek, meskipun program pelatihan telah disediakan, minat dan partisipasi perempuan cenderung rendah. Pemerintah desa menghadapi hambatan seperti kurangnya antusiasme peserta dan rendahnya rasa kepemilikan terhadap program yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan motivasi tidak hanya terletak pada penyediaan

program semata, tetapi juga pada bagaimana pendekatan dilakukan serta sejauh mana pelatihan tersebut mampu menyentuh kebutuhan psikologis dan sosial peserta.

Dengan demikian, jika dibandingkan, Desa Jambangan menunjukkan keberhasilan yang lebih nyata dalam menjalankan peran sebagai motivator, terutama karena pendekatan yang adaptif, relevan dengan zaman, dan dialogis, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembangunan pola pikir dan kebiasaan baru di kalangan perempuan. Sementara itu, hasil penelitian Isra Hayati menekankan pentingnya strategi komunikasi dan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial, agar pelatihan dapat menghasilkan perubahan yang lebih signifikan dan partisipatif.

2. Fasilitator

Peran fasilitator menurut Talcott Parsons (dalam Sutoro Eko, 2012) menekankan pada kemampuan pemerintah desa untuk menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan teknis yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensinya. Sebagai fasilitator, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan administratif yang mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas pemberdayaan perempuan. Fasilitasi ini menjadi elemen kunci yang memastikan bahwa perempuan tidak hanya termotivasi secara psikologis, tetapi juga memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya untuk benar-benar berkembang. Dalam konteks pemberdayaan, motivasi tanpa didukung akses dan fasilitas yang konkret sering kali tidak cukup untuk mendorong perubahan nyata.

Tabel 2. Fasilitasi Pemerintah Desa Jambangan

No	Nama Kegiatan	Fasilitas
1	Pelatihan Perempuan (Pembuatan Dimsum)	Tempat, Meja Kursi, Narasumber, Alat dan Bahan Praktek, Goodybag, Konsumsi, Uang saku
2	Koperasi Wanita	Tempat, Pendampingan penyusunan AD/ART, Bantuan legalisasi formal
3	Kader Kesehatan	Tempat, Alat Kesehatan, Teknologi informasi (Tab), Uang saku, konsumsi, dukungan mental

(Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Jambangan 2024)

- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

19. Sumber : Pemerintah Desa Jambangan (2024)

1. Gambar 3. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (2024)

Pemerintah Desa Jambangan menunjukkan komitmennya dengan memberikan dukungan penuh terhadap infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Bentuk fasilitasi tersebut mencakup penyediaan tempat kegiatan seperti Balai Desa, peralatan pelatihan sesuai kebutuhan jenis keterampilan yang diajarkan, akses terhadap pelatih atau narasumber yang kompeten, hingga bantuan administratif dalam pengelolaan program. Dukungan yang menyeluruh ini memungkinkan kegiatan pemberdayaan berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta menjadikan perempuan sebagai subjek aktif dalam pembangunan desa. Sejalan dengan Pernyataan Kepala Desa Jambangan yang menyatakan bahwa : “Kami memfasilitasi semua kebutuhan dasar kegiatan perempuan, dari tempat sampai pelatih. Harapannya, ibu-ibu merasa didukung dan bisa berkembang,”

Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak terbatas pada aktivitas pelatihan pemberdayaan perempuan semata. Salah satu bentuk fasilitasi strategis yang menonjol adalah pembentukan koperasi wanita sebagai wadah kelembagaan ekonomi berbasis komunitas. Pemerintah Desa Jambangan berperan aktif dalam mendampingi proses pendirian koperasi, mulai dari membantu legalisasi formal, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga menyediakan tempat untuk kegiatan rutin koperasi, seperti rapat anggota atau pelatihan lanjutan. Balai desa dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan yang mudah diakses dan representatif bagi anggota koperasi.

Dukungan administratif juga diberikan untuk memastikan koperasi memiliki legalitas dan kapasitas operasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitasi semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mendorong pemberdayaan individu, tetapi juga memperkuat struktur kolektif perempuan agar mampu berorganisasi secara mandiri. Pembentukan koperasi menjadi langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan serta menciptakan ruang belajar bersama yang berkelanjutan. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Binti Maisaroh selaku ketua koperasi kemuning bahwa:

“Kami dibantu desa untuk mendirikan koperasi. Modal awal memang patungan, tapi desa bantu urus legalitas dan dukungan administratif lainnya.” Sehingga Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa ini memberikan dampak jangka panjang dalam bentuk kemandirian kelembagaan perempuan. Melalui dukungan yang berkelanjutan, perempuan tidak hanya memperoleh ruang untuk belajar dan berkegiatan, tetapi juga membangun struktur organisasi yang mampu bertahan secara mandiri, seperti koperasi wanita. Kemandirian ini tidak hanya terlihat dari aspek administratif dan legalitas kelembagaan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan perempuan dalam mengelola program, mengambil keputusan, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Sumber : Pemerintah Desa Jambangan (2024)

1. Gambar 4. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Wanita Kemuning

Berikut adalah analisis persamaan dan perbedaan peran fasilitator Pemerintah Desa Jambangan dalam pemberdayaan perempuan jika dibandingkan dengan masing-masing penelitian dari Isra Hayati, Miftahul Jannah dkk., dan Vannia Tri Amanda dkk. Dalam penelitian Isra Hayati (2021), fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamamek bersifat terbatas dan belum maksimal. Pemerintah desa memang telah menyediakan kegiatan keterampilan seperti anyaman bagi kelompok perempuan PKK Srikandi, namun semangat fasilitasi belum disertai dengan dukungan infrastruktur, administrasi, atau legalitas kelembagaan yang memadai. Hal ini berbeda dengan di Desa Jambangan, di mana fasilitasi tidak hanya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga

dukungan menyeluruh seperti tempat, narasumber kompeten, bahkan pendirian koperasi dengan bantuan administratif yang lengkap. Sementara itu, persamaannya terletak pada peran desa dalam memfasilitasi kegiatan perempuan berbasis komunitas, meskipun hasilnya berbeda karena perbedaan pendekatan dan keseriusan pelaksanaan. Jika dibandingkan dengan penelitian Miftahul Jannah dkk. (2022) yang meneliti di Desa Air Balui, terdapat kesamaan bahwa pemerintah desa memainkan peran fasilitator dalam mendukung kegiatan perempuan melalui organisasi PKK. Pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kreativitas perempuan seperti kerajinan tangan dari barang bekas. Namun, fasilitas yang dimaksud lebih banyak berkisar pada pelaksanaan program-program yang telah dirancang, tanpa pendalaman pada aspek kelembagaan seperti koperasi atau penguatan legalitas. Ini berbeda dengan Desa Jambangan yang memfasilitasi hingga ke level kelembagaan ekonomi perempuan, menunjukkan bahwa fasilitas mereka lebih strategis dan berkelanjutan. Sedangkan dalam studi Vannia Tri Amanda dkk. (2023) yang membahas Kelompok Wanita Tani (KWT) Matahari di Desa Rantau Kasih, terlihat adanya peran fasilitator dari pemerintah desa, terutama dalam menyediakan akses pelatihan pertanian seperti penanaman sayuran di pekarangan rumah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman teknis, perhatian pemerintah, dan dukungan jangka panjang. Fasilitas lebih bersifat teknis-praktis dan belum menyentuh aspek kelembagaan maupun keberlanjutan kegiatan secara menyeluruh seperti yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Jambangan. Persamaannya adalah kedua desa sama-sama menyediakan pelatihan bagi perempuan, namun Desa Jambangan memperkuat peran fasilitatornya hingga mampu mendorong perempuan membentuk dan menjalankan koperasi secara mandiri.

3. Mobilisator

Menurut Talcott Parsons (dalam Sutoro Eko, 2012) Peran mobilisator adalah upaya pemerintah desa untuk menggerakkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, baik sumber daya manusia, alam, maupun sosial, untuk mendukung kegiatan pembangunan. Mobilisator adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, peran sebagai mobilisator menjadi sangat penting karena bertujuan mendorong perempuan keluar dari posisi pasif menuju peran yang lebih aktif dan produktif secara sosial maupun ekonomi. Mobilisasi tidak hanya berarti mengajak, tetapi juga membangun kesadaran dan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan desa.

Pemerintah Desa Jambangan menjalankan peran ini dengan mendorong dan menggerakkan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan melalui wadah organisasi seperti PKK, koperasi wanita, dan kader kesehatan. Proses mobilisasi dilakukan melalui pendekatan yang bersifat informal, seperti kunjungan rumah, pengajian rutin, atau pertemuan kelompok, serta pendekatan formal melalui musyawarah desa dan forum resmi lainnya. Pendekatan ganda ini membuat perempuan merasa lebih terjangkau dan terlibat, baik sebagai peserta maupun sebagai penggerak kegiatan.

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

Sumber : Pemerintah Desa Jambangan (2024)

Gambar 5. Kegiatan Posyandu di Desa Jambangan

- 1.

Sumber : Pemerintah Desa Jambangan (2024)

Gambar 6. Pertemuan Rutin Bulanan Kader Kesehatan

Keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Dengan begitu, peran mobilisator yang dijalankan pemerintah desa tidak hanya mengaktifkan partisipasi, tetapi juga membentuk kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas. Ini menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender. Keterlibatan aktif pemerintah desa dalam menggerakkan perempuan juga diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Jambangan sebagai berikut :

“Perempuan punya potensi besar untuk membangun desa. Kami rangkul mereka lewat organisasi agar bisa berperan aktif.”

Hal ini dipertegas oleh penyampaian Tutik Juroidah selaku kader Kesehatan yang mengatakan:

“Setiap kader posyandu punya jadwal penyuluhan gizi dan cek kesehatan ibu hamil, jadi perempuan di desa ini memang aktif di lapangan.”

Namun, tantangan muncul dalam menjangkau kelompok perempuan dengan keterbatasan sosial-ekonomi. Beberapa ibu rumah tangga, terutama yang memiliki tanggung jawab domestik tinggi atau keterbatasan akses transportasi, tidak dapat berpartisipasi secara rutin dalam kegiatan yang diselenggarakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan mobilisasi yang bersifat umum belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan perempuan di desa.

Situasi tersebut mengarah pada kebutuhan pengembangan model mobilisasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Misalnya, melalui penyesuaian waktu kegiatan agar lebih fleksibel, atau dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis Rukun Tetangga (RT) yang lebih dekat dengan tempat tinggal peserta. Dengan demikian, mobilisasi tidak hanya menjadi ajakan partisipasi, tetapi juga strategi untuk menghilangkan hambatan struktural yang dihadapi sebagian perempuan.

Berikut adalah paragraf perbandingan antara peran mobilisator Pemerintah Desa Jambangan dengan tiga skripsi sebelumnya (Isra Hayati, Miftahul Jannah dkk., dan Vannia Tri Amanda dkk.). Dalam skripsi Isra Hayati, peran mobilisator pemerintah desa belum berjalan maksimal. Meskipun kegiatan seperti pelatihan anyaman telah disediakan untuk kelompok PKK Srikandi, partisipasi perempuan sangat rendah. Tidak ada upaya mobilisasi aktif yang terlihat dalam menjangkau atau mendorong perempuan agar lebih terlibat. Ini berbeda dengan pendekatan Desa Jambangan yang aktif menggerakkan perempuan melalui kegiatan formal dan informal, serta memastikan keberlanjutan peran perempuan dalam organisasi seperti PKK dan koperasi.

Persamaannya, keduanya menyadari pentingnya peran perempuan, namun perbedaan terletak pada intensitas dan keberhasilan mobilisasi yang dijalankan.

Penelitian Miftahul Jannah dkk. menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Air Balui telah mendorong perempuan untuk aktif melalui kegiatan PKK, khususnya pelatihan kerajinan tangan. Namun, mobilisasi di sana masih terbatas pada kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat programatik, belum sepenuhnya menyentuh aspek pengorganisasian sosial dan kepemimpinan perempuan. Sementara itu, Desa Jambangan lebih progresif karena mampu menjadikan perempuan sebagai penggerak kegiatan pembangunan serta memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan. Kesamaan terletak pada penggunaan wadah seperti PKK, sedangkan perbedaannya pada skala dan kedalaman mobilisasi yang dicapai.

Dalam skripsi Vannia Tri Amanda dkk., peran mobilisator pemerintah desa terlihat dalam pembentukan Kelompok Wanita Tani Matahari yang mendorong perempuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Namun, keterbatasan pengetahuan teknis dan minimnya dukungan lanjutan dari pemerintah membuat mobilisasi ini tidak berkelanjutan. Dibandingkan dengan Desa Jambangan, yang menggunakan pendekatan menyeluruh dan adaptif (misalnya pengajian atau kunjungan rumah) untuk menjangkau berbagai kelompok perempuan, Desa Rantau Kasih masih terfokus pada mobilisasi fisik tanpa memperkuat jejaring sosial dan dukungan emosional. Kedua desa memiliki niat mobilisasi, namun Jambangan lebih berhasil dalam penerapan dan dampaknya.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, diperlukan strategi mobilisasi yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan lokal. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pelibatan kader perempuan di tingkat RT atau dusun sebagai agen mobilisasi komunitas. Dengan keterlibatan tokoh perempuan setempat yang memahami kondisi sosial warganya, penyampaian informasi dan ajakan untuk berpartisipasi dapat dilakukan secara lebih personal dan efektif. Selain itu, pelaksanaan kegiatan secara desentralistik misalnya pelatihan skala kecil di lingkungan RT atau sistem rotasi lokasi dapat meningkatkan keterjangkauan dan fleksibilitas waktu bagi perempuan dengan keterbatasan mobilitas.

Di samping itu, pemanfaatan media digital sederhana seperti grup WhatsApp atau pengumuman berbasis audio visual lokal (pengeras suara mushola, banner, dan infografik) juga dapat membantu menyebarkan informasi dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan kelompok perempuan. Strategi ini bertujuan agar mobilisasi tidak hanya menjangkau lebih banyak peserta, tetapi juga membangun kedekatan emosional yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap program. Dengan demikian, mobilisasi menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berdampak dalam jangka panjang.

4. Regulator

Menurut Talcott Parsons (dalam Sutoro Eko, 2012) peran regulator adalah fungsi pemerintah desa dalam menyusun aturan main (regulasi) dan menjamin keteraturan sosial dalam pembangunan desa, serta menjaga keadilan dan keterbukaan. Sebagai regulator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, aturan, dan regulasi yang mengikat serta menjamin keberlanjutan program pemberdayaan perempuan. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif pemberdayaan tidak hanya bersifat jangka pendek atau bergantung pada figur tertentu, tetapi memiliki dasar hukum dan kebijakan yang jelas. Regulasi formal berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang memberikan legitimasi terhadap program-program yang dijalankan.

Keberadaan regulasi juga berperan dalam menjaga arah dan konsistensi program agar tidak mudah terpengaruh oleh dinamika politik, seperti pergantian kepemimpinan desa atau perubahan prioritas pembangunan. Dengan regulasi yang kuat, program pemberdayaan dapat terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDDes, sehingga menjadikannya bagian dari agenda pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi program pemberdayaan sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Dalam menjalankan peran sebagai regulator, Pemerintah Desa Jambangan telah menunjukkan komitmennya dengan memasukkan program pemberdayaan perempuan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Langkah ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan desa yang direncanakan secara formal setiap tahunnya. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan mandiri dan berkelanjutan.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5.

6. Sumber : Pemerintah Desa Jambangan (2024)

1. Gambar 7. Musyawarah Desa Tentang Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Ketiadaan regulasi khusus dalam bentuk Perdes menunjukkan bahwa landasan hukum program masih bersifat operasional, belum mengikat secara struktural dalam jangka panjang. Padahal, keberadaan Perdes yang mengatur secara eksplisit tentang pemberdayaan perempuan dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat keberlanjutan program, terutama dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan atau dinamika politik desa. Selain itu, regulasi desa yang jelas juga dapat memberikan perlindungan dan jaminan akses yang setara bagi seluruh kelompok perempuan terhadap sumber daya pembangunan desa. Kondisi ini juga disampaikan oleh Ibu Hj. Qoyyimah dalam pernyataan berikut: "Kami sudah memasukkan program pemberdayaan perempuan ke RKPDDes setiap tahun. Ke depan kami sedang persiapkan Peraturan Desa agar programnya lebih kuat secara hukum,"

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak H. Sulihan, S.Ag. S.Ap selaku sekretaris desa menyampaikan:

"Memang belum ada Perdes khusus, tapi program pemberdayaan ini masuk di RKPDDes dan kami bahas dalam musyawarah desa setiap tahun,"

Tanpa dasar hukum yang kuat, program pemberdayaan perempuan berisiko terhenti atau mengalami perubahan orientasi ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan desa. Ketergantungan pada kebijakan tahunan seperti RKPDDes membuat program rentan terhadap dinamika politik lokal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pemberdayaan perempuan sebagai bentuk komitmen kelembagaan jangka panjang.

Penyusunan Perdes tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi program, memperjelas alokasi anggaran, serta membuka ruang partisipasi perempuan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi kegiatan insidental, tetapi bagian integral dari visi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Talcott Parsons (dalam Sutoro Eko, 2012), peran regulator mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam menyusun regulasi dan menjamin keteraturan sosial dalam pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, regulasi diperlukan agar program tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat.

Di Desa Jambangan, peran ini diwujudkan dengan memasukkan program pemberdayaan perempuan ke dalam RKPDDes, meski belum diatur melalui

Perdes khusus. Hal ini menunjukkan komitmen awal yang baik, namun masih membutuhkan penguatan kelembagaan agar program lebih tahan terhadap perubahan kepemimpinan.

Jika dibandingkan dengan skripsi Isra Hayati, peran regulator di Desa Lamamek belum didukung oleh regulasi formal. Program hanya bergantung pada strategi dan komunikasi, sehingga rentan tidak berkelanjutan. Begitu pula dalam skripsi Miftahul Jannah dkk., peran regulator di Desa Air Balui belum terlihat dalam bentuk kebijakan tertulis, hanya sebatas dukungan pelatihan. Sementara dalam skripsi Vannia Tri Amanda dkk., kegiatan KWT juga belum dilandasi Perdes, dan masih bersifat insidental.

Dari ketiga studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Jambangan lebih progresif karena telah mengintegrasikan program dalam perencanaan desa dan merencanakan Perdes sebagai bentuk komitmen kelembagaan jangka panjang.

2. IV. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Jambangan telah menjalankan perannya secara optimal dalam pemberdayaan perempuan melalui empat indikator peran menurut Talcott Parsons, yaitu motivator, fasilitator, mobilisator, dan regulator. Sebagai motivator, Pemerintah Desa Jambangan berhasil membangun semangat, kepercayaan diri, dan kesadaran perempuan untuk berdaya melalui pelatihan rutin yang variatif dan kontekstual, seperti keterampilan tangan dan bisnis digital. Pendekatan partisipatif serta dialogis membuat peserta merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana secara menyeluruh untuk mendukung pemberdayaan perempuan, mulai dari penyediaan tempat, peralatan, narasumber, hingga pembentukan koperasi wanita. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitasi tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga kelembagaan yang berkelanjutan. Sebagai mobilisator, Pemerintah Desa Jambangan mampu menggerakkan perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa melalui organisasi-organisasi lokal seperti PKK, koperasi, dan kader kesehatan. Namun, tantangan masih ditemukan dalam menjangkau perempuan dengan keterbatasan sosial-ekonomi, sehingga diperlukan strategi mobilisasi yang lebih inklusif dan adaptif. Sebagai regulator, Pemerintah Desa Jambangan telah menunjukkan komitmen awal dengan mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan dalam RKPDes setiap tahunnya. Namun, belum adanya Peraturan Desa (Perdes) khusus masih menjadi kelemahan yang perlu dibenahi agar program memiliki dasar hukum yang kuat, berkelanjutan, dan tidak rentan terhadap perubahan kebijakan.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu (Isra Hayati, Miftahul Jannah dkk., dan Vannia Tri Amanda dkk.), Desa Jambangan menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menjalankan keempat peran tersebut secara terintegrasi dan adaptif. Keberhasilan ini didorong oleh pendekatan yang holistik, keterlibatan aktif masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang relatif lebih kuat. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan di Desa Jambangan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi desa lain dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan.

1. Ucapan terima kasih

Karya Tulis Ilmiah ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik. Dalam hal ini penulis menyadari dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan mampu tanpa adanya dorongan dan dukungan dari beberapa pihak. Terdapat beberapa pihak yang telah membantu memberikan arahan atau informasi terkait pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Hj. Qoyyimah selaku Kepala Desa Jambangan, Bapak H. Sulihan, S.Ag, S.Ap selaku Sekretaris Desa, Ibu Khusnul Khotimah selaku anggota PKK, Ibu Binti Maisaroh selaku ketua Koperasi Kemuning dan Ibu Tutik Juroidah selaku kader kesehatan yang juga menjadi narasumber dan juga masyarakat Desa Jambangan selaku narasumber penelitian. Terima kasih kepada suami dan anak-anak tercinta serta keluarga besar yang selalu berperan dengan memberikan dukungan dan pengertian dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah kepada kita semua.

1. Referensi

- [1] M. Miftahul Jannah, "Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan dibidang kesejahteraan keluarga (PKK)," WEDANA J. Kaji. Pemerintahan, Polit. dan Birokrasi, vol. 8, no. 2, pp. 6-14, 2022, doi: 10.25299/wedana.2022.vol8(2).10271.
- [2] A. Mardhiah and S. Safrida, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kayu," Din. Gov. J. Ilmu Adm. Negara, vol. 12, no. 3, pp. 343-352, 2022, doi: 10.33005/jdg.v12i3.3259.
- [3] Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj. Qoyyimah Selaku Kepala Desa Jambangan.
- [4] Hasil Wawancara Dengan Ibu Binti Maisaroh Selaku Kepala Koperasi Wanita Kemuning.
- [5] Hasil Wawancara Dengan Ibu Khusnul Khotimah Selaku Anggota PKK Desa Jambangan.
- [6] H. Isra, "Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)," Skripsi, vol. 2, no. 1, pp. 57-67, 2019.
- [7] V. T. Amanda, A. Amaliatulwalidain, and I. Isabella, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Pada Kelompok Wanita Tani Matahari," J. Prog. Adm. Publik, vol. 3, no. 2, pp. 70-75, 2023, doi: 10.37090/jpap.v3i2.1159.
- [8] S. Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- [9] E. Sutoro and Dkk, Membangun Desa, Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2022. [Online]. Available: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/visualisasi/membangun-desa-membangun-indonesia>
- [10] T. Sulistyowati, "Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam Buku Saku Pemberdayaan Perempuan".
- [11] M. S. Zuhri and L. Mursyidah, "Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan," Indones. J. Cult. Community Dev., vol. 15 No 3, 2024, doi: 10.21070/IJCCD.V15I3.1092.
- [12] N. Indriantoro and B. Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntasnsi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- [13] Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- [14] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- [15] Sugiyono, "Metode Penelitian Sugiyono - 2015.pdf." p. 346, 2015.
- [16] M. Huberman and J. Saldana, Qualitative Data Analysis, 3rd ed. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.